

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis juga melakukan pencarian terhadap studi-studi yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Melalui eksplorasi, penelitian yang dilakukan ini akan memastikan aspek ruang yang akan diteliti, dengan tujuan agar penelitian yang sama tidak berulang dan tidak mengulangi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk di dalamnya.:

1. Rizki Linda Listia (2016) yang berjudul “Pengaruh Program Simpan Pinjam terhadap Kesejahteraan Anggota Kelompok SPP di UPK Mandiri Sejahtera Binangun Kabupaten Cilacap”. Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif. Menurut penelitian ini, program SPP di UPK Mandiri Sejahtera secara signifikan dan positif mempengaruhi kesejahteraan peserta SPP. Berdasarkan temuan penelitian, nilai koefisien regresi (F) sebesar 203,082 dan secara statistik signifikan pada $0,000 < 0,05$. R Square sebesar 0,723 menunjukkan bahwa program simpan pinjam memiliki dampak positif sebesar 72,30% terhadap kesejahteraan peserta kelompok SPP, sedangkan faktor lain yang tidak dievaluasi memiliki dampak negatif sebesar 27,70%.

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan melihat pemberdayaan masyarakat. Kedua penelitian ini memiliki perbedaan dari segi lokasi atau tempat penelitian dilakukan.

2. Dwi Mulyani (2017) yang berjudul “Pengaruh Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Pendapatan Peternak pada Kelompok “PEGUMAS” desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas”. Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif. Menurut penelitian ini, inisiatif pemberdayaan masyarakat ternak kambing Etawa berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan peternak dalam perspektif kelompok "PEGUMAS". Berdasarkan koefisien determinasi, inisiatif pemberdayaan masyarakat ternak kambing Etawa bertanggung jawab terhadap 76,6% peningkatan pendapatan peternak, dan sisanya berasal dari sumber lain.

Subjek penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat. Penelitian penulis akan berbeda dari penelitian lain karena menggunakan salah satu program DAPM untuk melakukan penelitian pemberdayaan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan ternak kambing sebagai subjeknya.

3. Adelia Larosa (2017) dengan judul “Pengaruh Program Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Dalam penelitian lapangan ini, data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program sarana dan prasarana

dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang didanai oleh P2MB di Desa Way Dadi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan). Namun, meskipun program ini dari, oleh, dan untuk masyarakat, masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan. Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan P2MB di Desa Way Dadi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena mengandung unsur riba karena adanya penetapan bunga. Namun, inisiatif ini memberikan dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan dengan bertambahnya modal usaha, ajakan kepada masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, dan ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penciptaan kota yang lebih modern.

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan melihat pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu membahas dampak program pemberdayaan secara keseluruhan, namun penulis hanya akan berkonsentrasi pada salah satu program pemberdayaan dalam penelitiannya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

4. Penelitian Ari Pratama (2018) dengan judul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif. Temuannya menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PNPM Mandiri berhasil menurunkan tingkat

kemiskinan, yang ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 75%.

Subjek penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat. Kedua penelitian mempunyai perbedaan pada fokus dan tujuan penelitian.

5. Penelitian Indah Purnama Dewi (2021) dengan judul “Pelaksanaan Penyaluran Oinjaman Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Pariangan”. Penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa adopsi penyaluran dana bergulir DAPM dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, yaitu dengan memulai atau mengembangkan usaha mikro.

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan melihat pemberdayaan masyarakat. Sementara penelitian penulis akan berbeda dari penelitian sebelumnya karena akan menggunakan teknik kuantitatif daripada metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada proses, metode, atau tindakan untuk memberikan daya dan kemampuan. Menurut Sany (2019: 34), pemberdayaan adalah proses memberikan kewenangan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk

mengambil tindakan dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Secara konseptual, pemberdayaan memiliki akar dari konsep "*empowerment*" yang terkait dengan gagasan tentang "kekuasaan". Gagasan pemberdayaan sebagai sebuah proses transformasi kemudian menjadi penting. Dengan kata lain, apabila kekuasaan tidak dapat mengalami perubahan, maka pelaksanaan pemberdayaan menjadi tidak mungkin dalam bentuk apa pun. Kedua, kekuasaan mampu dibuha. Apabila kekuasaan tidak dapat mengalami perubahan, maka pelaksanaan pemberdayaan menjadi tidak memungkinkan. Selain itu, kekuasaan dapat ditingkatkan. Gagasan ini menyoroti gagasan tentang kekuasaan yang dinamis dan bersifat manik (Suharto, 2017). Kemudian, menurut Jacqueline (2014), pemberdayaan adalah proses memberikan orang melalui atasan mereka kekuasaan, otoritas dengan tanggung jawab, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, karyawan dapat memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk secara aktif melaksanakan tanggung jawab mereka dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka. Suharto (2017) menegaskan bahwa 5P - pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan - dapat digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat.

Sebenarnya, definisi pemberdayaan bervariasi berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan. Bergantung

pada keadaan setempat, teknik pemberdayaan yang digunakan di satu daerah dan satu masyarakat dapat berbeda dengan yang digunakan di tempat lain dan masyarakat lain. Sulit untuk mendefinisikan pemberdayaan secara tepat karena ide pemberdayaan berbeda tergantung pada situasi dan kondisi (Sany, 2019:34).

Oleh karena itu, pemberdayaan ialah suatu mekanisme yang memiliki maksud tertentu. Pemberdayaan sebagai sebuah mekanisme melibatkan sejumlah tindakan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, terutama mereka yang sedang berjuang melawan kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah usaha sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosialnya, termasuk memiliki rasa percaya diri, kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, sumber penghasilan, keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan kemandirian dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Efektivitas pemberdayaan sebagai sebuah proses sering kali ditentukan oleh definisi pemberdayaan sebagai sebuah tujuan.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Zubaedi (2013: 24-25), adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang hidup dalam

kemelaratan agar mereka dapat melepaskan diri dari lingkaran kemelaratan dan keterbelakangan. Membangun kapasitas masyarakat melalui dorongan, motivasi, meningkatkan pengetahuan tentang potensi mereka, dan bekerja untuk mengubah potensi tersebut menjadi tindakan yang efektif adalah bagian dari pemberdayaan. Gagasan pemberdayaan mencakup lebih dari sekadar cara untuk memenuhi kebutuhan dasar atau perlindungan terhadap proses kemiskinan lebih lanjut. Menurut Jim Ife, ada hubungan langsung antara gagasan tentang kekuasaan dan mereka yang kurang beruntung dengan konsep pemberdayaan.

Untuk memenuhi kebutuhan sosial atau memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, anggota masyarakat mengorganisir diri mereka sendiri untuk membuat rencana dan kegiatan bersama. Proses ini dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Robert Chambers (Alfitri, 2011: 22), adalah sebuah gagasan untuk pertumbuhan ekonomi yang merangkum cita-cita sosial. Chambers adalah seorang ahli yang gagasannya banyak ditujukan untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat. Paradigma baru pembangunan yang berfokus pada kebutuhan individu, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan tercermin dalam gagasan ini. Gagasan yang

pemikirannya akhir-akhir ini semakin diperluas sebagai upaya mencari alternatif dari konsep pertumbuhan di masa lalu ini, lebih besar dari sekedar menyediakan kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk menghindari kemiskinan yang lebih besar (jaring pengaman).

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai sebuah proses kegiatan, program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sasaran sehingga mereka menjadi lebih sejahtera, berdaya, atau memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada akhirnya, hal ini akan membuat masyarakat menjadi mandiri. Tentu saja, kemandirian yang dimaksud tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya, kebebasan berbicara dan berpendapat, serta otonomi masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Pada akhirnya, terbangunnya kebebasan masyarakat dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka adalah tujuan akhir yang diharapkan dari sebuah program atau kegiatan pemberdayaan.

Tujuan dasar dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya karena keadaan internal (pandangan mereka sendiri) atau keadaan eksternal (ditindas oleh sistem sosial yang tidak adil). Gagasan tentang

kelompok lemah dan alasan ketidakberdayaan yang mereka hadapi harus dipahami secara utuh untuk memahami pemberdayaan secara utuh (Hamid, 2018: 11-12).

Dengan kata lain, inisiatif pemberdayaan masyarakat ini dilakukan secara terencana, terorganisir, dan berkelanjutan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan berbagai ide dan komponen inovatif lainnya kepada khalayak sasaran dalam bentuk perilaku, pemikiran, atau kreasi manusia yang baru.
2. Memberikan pengetahuan dan membantu masyarakat dalam melaksanakan suatu tugas secara mandiri yang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi mereka.
3. Meningkatkan tingkat melek huruf dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kelompok sasaran terhadap inovasi dan berdampak pada munculnya sikap dan perilaku yang lebih kreatif dan inovatif.
4. Kalau ada bantuan dalam bentuk pembiayaan usaha, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan daya cipta kelompok sasaran sehingga mereka dapat bekerja atas inisiatif sendiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari luar.
5. Karena tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan motivasi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat, maka

fasilitator harus selalu memberikan pengarahan dan pengawasan agar tujuan utama kegiatan dapat tercapai. (Haris, 2014:54-55).

c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam

Nabi Muhammad menggunakan konsep pemberdayaan. Beliau memberikan contoh-contoh yang terkait dengan konsep keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial. Sejak masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sikap toleran yang sesungguhnya telah dipraktikkan, dan semua warga negara sekarang diharapkan untuk menjunjung tinggi ajaran Islam dengan berpegang teguh pada gagasan untuk selalu membantu satu sama lain (ta'awun). Tidak ada lagi kesenjangan sosial atau ekonomi berkat kesetaraan dan prospek komersial.

Salah satu aturan ini sangat dekat, dan rincian berikut ini akan diberikan secara lebih rinci:

a. Prinsip Keadilan

Setelah istilah Allah dan Ilm, kata keadilan disebut tiga kali dalam Al Qur'an. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip fundamental ini bagi Islam. Keadilan adalah konsep Islam tentang kebebasan bersyarat, yang jika diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, akan mengacaukan struktur sosial yang mendukung pemberdayaan manusia.

Dalam budaya Muslim, keadilan sosial diterapkan pada semua anggota masyarakat, tanpa memandang etnis,

keyakinan, bahasa, atau warna kulit mereka. Ini adalah tingkat keadilan tertinggi, yang belum pernah dicapai oleh hukum domestik maupun internasional. Orang tidak akan khawatir akan ditindas oleh orang yang lebih beruntung ketika setiap Muslim yang tinggal di planet ini mampu melaksanakan keadilan.

b. Prinsip Persamaan

Landasan dari prinsip kesetaraan adalah sama dengan landasan prinsip keadilan. Islam memandang manusia sebagai individu, bukan sebagai anggota masyarakat yang hidup berdampingan di bawah suatu negara. Terlepas dari perbedaan mereka, semua orang adalah hamba Allah; baik status mereka sebagai manusia maupun hak dan tanggung jawab mereka tidak berubah. Setiap kebutuhan dasar manusia benar-benar telah dikontrol dengan cermat, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka sesuai dengan kapasitas mereka.

Tidak ada superioritas beberapa orang di atas yang lain dalam hal asal usul dan penciptaan sesuai dengan prinsip kesetaraan. Perbedaan yang ada hanyalah perbedaan yang berkaitan dengan bakat, talenta, altruisme, dan usaha, serta perbedaan dalam persyaratan kerja dan profesi. Islam juga tidak membedakan peringkat sosial ekonomi. Tingkat ketakwaan kepada

Allah lah yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Hasilnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kuat.

c. Prinsip Partisipasi

Komponen utama dari strategi pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi, yang merupakan proses partisipatif yang berlangsung lama. Konsep partisipasi menuntut keterlibatan individu secara langsung dan aktif sebagai jaminan dalam pengambilan keputusan kelompok untuk kemajuan diri, kehidupan, dan lingkungan. Partisipasi sebagai kontribusi sukarela yang meningkatkan martabat dan harga diri menghasilkan lingkaran umpan balik yang memperluas zona dan memberikan iklim yang menguntungkan bagi pengembangan masyarakat. Sebagai hasilnya, partisipasi tertanam kuat dalam budaya Muslim sepanjang masa hidup Nabi dan memiliki efek positif pada distribusi kekuasaan di antara penduduk pada saat itu.

d. Prinsip Tolong-menolong

Menurut bahasa, Tolong-Menolong (ta'awun), yang berarti berbuat baik, berasal dari bahasa Arab. Sementara itu, frasa ini mengacu pada suatu pekerjaan atau perbuatan yang dipandu oleh hati nurani dan semata-mata mengejar keridhaan Allah SWT.

Islam telah berhasil menawarkan jawaban yang dapat diterapkan untuk masalah-masalah ekonomi kontemporer dengan mengubah masyarakatnya dari masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri menjadi masyarakat yang altruistik. Setiap orang didorong untuk bekerja sama dalam membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, yang berpadu untuk menghasilkan nilai tolong-menolong (Susilo, 2016: 201-205).

Meskipun penerapan prinsip-prinsip muamalah mengharamkan riba, namun masih ada pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan riba. Riba adalah perhitungan jumlah pengembalian pinjaman yang sama atau lebih dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Inilah beberapa bentuk riba:

1. Riba fadhil adalah praktik jual beli atau pertukaran barang atau benda dengan cara yang menghasilkan riba. Salah satu contohnya adalah penukaran uang Rp. 100.000,- dengan uang pecahan Rp. 2.000,-, namun jumlah uang yang ditukarkan hanya 48 lembar, sehingga nominal yang diserahkan hanya Rp. 96.000,-. Contoh lainnya adalah penukaran emas 24 karat dengan emas 18 karat.
2. Riba yad adalah pertukaran barang dan transaksi termasuk jual beli sangat menentukan ada tidaknya

riba. Kedua barang tersebut akan diserahterimakan, namun akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Sebuah sepeda motor, misalnya, akan berharga Rp. 12 juta jika dibayar tunai. Sementara itu, harga motor tersebut akan menjadi Rp. 15 juta jika konsumen membayar secara kredit.

3. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah prosedur transaksi jual beli. Transaksi ini sering kali mencakup dua jenis barang yang sebanding. Namun, ada periode penundaan untuk pembayaran. Perdagangan emas 24 karat antara dua pihak yang berbeda adalah salah satu contohnya. Karena harga emas adalah target yang bergerak, maka adalah riba ketika pihak pertama telah menyerahkan emas dan pihak kedua berjanji untuk memberikan emasnya dalam satu bulan.
4. Riba qardh adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat orang yang menerima pinjaman atau pemberi utang mendapatkan keuntungan atau memperoleh imbalan. Contohnya adalah seorang rentenir yang memberikan pinjaman sebesar Rp 100 juta dengan bunga 20% yang jatuh tempo dalam enam bulan.
5. Sejumlah kecil tambahan pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman dikenal sebagai riba jahiliyah. Biasanya, hal ini terjadi karena peminjam tidak dapat

melakukan pembayaran pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan jangka waktu pengembalian selama enam bulan adalah contoh transaksi. Jika peminjam tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, maka jumlah pinjaman akan bertambah.

d. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) PNPM Mandiri atau dikenal juga dengan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang secara aktif telah memberikan kontribusi dalam pembiayaan usaha produktif masyarakat miskin yang keberadaannya tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan persyaratan yang mudah dan sederhana yang dapat dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan (Putri, 2021: 13-14).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan program pemerintah yang disalurkan oleh Pemerintah Indonesia yang berawal dari Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK), kemudian berganti nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), dan diakhiri dengan penghentian program yang kemudian dikenal dengan aset DAPM. Aset DAPM merupakan program kelanjutan dari seluruh aset dana

program ekonomi dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Melalui musyawarah antar desa (MAD) yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing desa, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan, UPK DAPM Poleang Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 2009 di Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat Keputusan Bupati No. 13/2014 tentang penetapan pelaksana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) memberikan kedudukan hukum bagi UPK. Dengan Akta Notaris No: AHU-00236.AHA.02.01. Tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016, dan SK KEMENKUM HAM No: AHU-0006161.AHA, UPK Poleang Selatan telah memiliki Badan Hukum (PBH).01.07. Tahun 2017, yang disebut dengan DAPM Puncak Harapan Poleang Selatan, yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2017.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mencakup Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Untuk kebutuhan operasional PPK, dibentuklah UPK. Karena semua aturan dan standar operasional pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (PNPM) Mandiri Pedesaan saat ini telah disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP, yang

merupakan integrasi dari PPK, maka untuk menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip PPK, maka untuk pengelolaannya diperlukan suatu lembaga yang mampu menjaga pelaksanaan PTO tersebut.

Dokumentasi setiap kegiatan diperlukan untuk menjamin pencatatan dan pengarsipan, serta keamanan, pertanggungjawaban, dan penyerahan uang dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) ke kecamatan dan dari kecamatan ke desa melalui TPK. Oleh karena itu, dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dan berkantor pusat di kecamatan yang dipilih.

Musyawarah Antar Desa (MAD) perdana yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Poleang Selatan pada tanggal 21 September 2009 menghasilkan pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Poleang Selatan. (Sumber: Kantor UPK DAPM Desa Waemputtang, Tahun 2009).

e. Indikator Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan program Dana Perwalian Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikator program. Keberhasilan suatu program dapat dinilai dengan membandingkan antara tujuan dan hasilnya, dan juga

dapat dinilai dengan menggunakan umpan balik yang diberikan oleh para pesertanya. Efektivitas mengukur seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan pada awalnya telah tercapai.

Menurut Budiani dalam Putri (2021), banyak metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas, antara lain sebagai berikut:

1. **Ketetapan Sasaran Program**

Penargetan program ditentukan oleh seberapa dekat peserta program mematuhi tujuan yang telah ditentukan.

2. **Sosialisasi Program**

Kemampuan untuk melakukan sosialisasi program oleh pelaksana program sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi tentang pelaksanaan program kepada masyarakat dan peserta sasaran secara keseluruhan.

3. **Tujuan Program**

Tujuan program mengukur seberapa dekat hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. **Pemantauan program**

Pemantauan program adalah tugas yang dilakukan setelah program dijalankan untuk memperhatikan tujuan program.

2.2.2. Teori Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera, yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat dalam bahasa Indonesia, adalah asal kata kesejahteraan. Kata ini juga dapat digunakan untuk merujuk pada situasi positif atau keadaan di mana orang-orang yang terlibat dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Seseorang terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga dapat hidup dengan aman dan tenteram, baik secara lahir maupun batin. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam arti yang lebih luas (Sodiq, 2015: 383-384).

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat agar dapat tumbuh dan menjalankan peran sosialnya, menurut UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 (Larossa, 2017: 23).

Kesejahteraan fisik didasarkan pada kriteria universal yaitu kesehatan, sandang, pangan, dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial). Kesejahteraan batin adalah keadaan damai bagi seseorang karena kebutuhan fisik dan mentalnya terpenuhi. Sementara hal ini berlangsung, kesejahteraan batin mencakup perspektif mental, emosional, dan spiritual. Tujuan dari peperangan, bukan caranya (Maeswara, 2009: 246), adalah kesejahteraan. Sistem nilai Islam, sistem distribusi yang adil, keamanan, dan tatanan sosial adalah

empat komponen fundamental yang membentuk ide filosofis kesejahteraan dalam Islam (Beik & Arsyianti, 2016: 28). Ketika cita-cita Islam menguasai kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kesejahteraan manusia adalah intinya. (Aravik, 2016:202).

Budie Wibawa merujuk pada Skidmore, yang mengatakan bahwa "Definisi kesejahteraan yang komprehensif mencakup keadaan yang menguntungkan yang memenuhi kebutuhan beberapa individu, termasuk kebutuhan fisik, mental, emosional, dan finansial." (Arifin, 2015: 21-22).

Dalam bukunya *Ihya 'Ulumudd*, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ada lima faktor yang memiliki dampak signifikan dalam mencapai kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Faktor-faktor tersebut adalah lima pilar *Maqashid Syariah*, yang meliputi agama (*Ad-din*), kehidupan atau jiwa (*Nafs*), keluarga atau keturunan (*Nasl*), harta benda atau kekayaan (*Mal*), dan intelektualitas atau akal (*Aql*) (Permana, 2019: 30).

Menurut Soekanto, masyarakat terdiri dari semua orang yang tinggal di suatu dusun, kota, atau suku bangsa atau negara tertentu. Ketika ada beberapa kelompok orang yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan di suatu wilayah dengan batas-batas geografis yang jelas, baik dalam

jumlah kecil maupun besar, masyarakat mulai berkembang. (Dumasari, 2014:2).

Tingkat kehidupan di dalam masyarakat dapat memberikan gambaran tentang status kesejahteraan masyarakat. Sen Pressmen mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah total dari pilihan-pilihan yang dimiliki oleh masyarakat dan kebebasan mereka untuk memilih di antara pilihan-pilihan tersebut, dan bahwa kesejahteraan ini akan mencapai titik tertinggi apabila setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan, makanan, dan hak pilih (Larossa, 2017: 23).

Todaro dan Stephen C. Smith menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan indikator seberapa baik sebuah komunitas telah berkembang sebagai konsekuensi dari kerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup.

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kapasitas dan distribusi yang adil atas kebutuhan termasuk makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan keamanan.

b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan kondisi kehidupan, tingkat pendapatan, dan pencapaian pendidikan.

- c. Meningkatkan skala ekonomi dan berbagai pilihan sosial yang tersedia bagi masyarakat dan negara

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ada kemungkinan kerja yang lebih besar dari masyarakat yang lebih baik. (Larossa, 2017:24).

b. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, kebahagiaan dimulai dengan penyerahan diri secara total kepada Allah SWT. karena kepribadian ganda membuat hati sulit untuk merasa damai. Sebagai ilustrasi yang sempurna, Allah adalah satu-satunya yang, setelah mengerahkan segala upaya manusia, memilih tindakan mana yang terbaik dan selalu menyertakan pengetahuan. Akibatnya, Allah memerintahkan manusia untuk mengerahkan segala daya dan upaya secara maksimal sebelum akhirnya berserah diri kepada-Nya (Notowidagdo, 2016: 47).

Model CIBEST dan indeks kemiskinan digunakan dalam studi Islam untuk mengkaji kemiskinan dari perspektif material-spiritual. Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti memulai model CIBEST pada tahun 2015 dengan judul Konstruksi Model CIBEST sebagai Pengukuran Indeks Kesejahteraan Kemiskinan dalam Perspektif Islam. Menurut penelitian tersebut, konsepsi Islam tentang kemiskinan dan kesejahteraan mempertimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan. Penelitian ini juga berhasil menciptakan model CIBEST. Model CIBEST dibagi menjadi empat

kuadran: kuadran absolut, kuadran spiritual, kuadran material, dan kuadran kesejahteraan.

1. Tingkat kecukupan finansial dan spiritual adalah dasar dari indeks kesejahteraan, yang menilai kesejahteraan keluarga. Kriteria kebutuhan material didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, transportasi, dan komunikasi.
2. Jumlah rumah atau keluarga yang miskin secara finansial tetapi kaya secara spiritual ditunjukkan oleh indeks kemiskinan material.
3. Skor kemiskinan spiritual dihitung berdasarkan lima faktor, yaitu salat, puasa, zakat infak, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah.
4. Proporsi keluarga dengan kondisi material dan spiritual yang rendah membentuk indeks kemiskinan absolut.

c. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan dari fungsi kesejahteraan masyarakat adalah untuk menghilangkan atau mengurangi secara signifikan tekanan yang ditimbulkan oleh perubahan sosio-ekonomi, sehingga menghilangkan efek yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan ini meliputi:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

bertujuan untuk mencegah munculnya masalah sosial baru melalui penguatan individu, keluarga, dan masyarakat. Upaya pencegahan dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi sangat menekankan pada inisiatif yang mendukung pengembangan institusi sosial dan pola hubungan sosial yang baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Untuk menghilangkan penyebab keterbatasan fisik, emosional, dan sosial agar mereka yang menderita masalah-masalah ini dapat kembali beroperasi secara normal di masyarakat.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Untuk memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap pertumbuhan atau perkembangan sumber daya masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Kegiatan yang membantu dalam mencapai tujuan disiplin ilmu atau sektor layanan kesejahteraan sosial lainnya. (Adi & Fahrudin, 2012:12).

d. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Berbagai indikator dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan di suatu komunitas menentukan apakah komunitas tersebut makmur atau tidak. Kolle dan Rosni (2012) menyebutkan beberapa

indikator berikut ini sebagai beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari produksi, tenaga kerja, bakat, dan keterampilan dari kegiatan yang dikenal sebagai penghasilan. Peserta dana bergulir didefinisikan sebagai orang yang memiliki pendapatan rata-rata yang cukup untuk meningkatkan standar hidup keluarganya. Pendapatan yang diterima sebelum meminjam uang dari DAPM hanya sekitar Rp. 500.000,- per bulan, setelah meminjam uang ini meningkat menjadi Rp. 900.000,- hingga Rp. 5.000.000,- seperti yang diterima oleh para anggota kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

2. Pendidikan yang Terjangkau

Pendidikan yang dapat diakses mengacu pada kemudahan seseorang untuk mendapatkan tempat duduk di sekolah, membayar biaya pendidikan, dan menavigasi sistem pendidikan.

3. Kualitas Kesehatan

Pendapat pelanggan tentang keunggulan layanan kesehatan, yang merupakan akumulasi kebahagiaan pelanggan melalui banyak pengalaman layanan, menentukan kualitas layanan.

2.3. Grand Teori

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah gagasan untuk pertumbuhan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, menurut Robert Chambers (Alfitri, 2011: 22), seorang tokoh yang pemikiran dan karyanya memiliki komitmen terhadap tujuan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Paradigma baru pembangunan yang berfokus pada kebutuhan individu, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan tercermin dalam gagasan ini. Gagasan ini, yang pemikirannya akhir-akhir ini semakin diperluas sebagai upaya untuk menemukan alternatif dari konsep pertumbuhan di masa lalu, lebih besar dari sekedar menyediakan kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk menghindari kemiskinan yang lebih besar (jaring pengaman). Budiani dalam Putri (2021) menyatakan bahwa sejumlah ukuran, termasuk yang tercantum di bawah ini, digunakan untuk mengukur keberhasilan program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM):

1. Ketetapan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan

b. Kesejahteraan Masyarakat

Budie Wibawa merujuk pada Skidmore, yang mengatakan bahwa "Definisi kesejahteraan yang komprehensif mencakup keadaan yang menguntungkan yang memenuhi kebutuhan beberapa individu, termasuk kebutuhan fisik, mental, emosional, dan finansial." (Arifin, 2015: 21-22).

Tujuan utama hukum Islam, atau yang dikenal dengan Maqashid Syariah, meliputi agama (Ad-din), kehidupan atau jiwa (Nafs), keluarga atau keturunan (Nasl), harta benda atau kekayaan (Mal), dan kecerdasan atau akal (Aql), menurut Imam Al-Ghazali, yang menuliskan hal tersebut dalam bukunya *Ihya' Ulumud dalam masyarakat Islam* (Permana, 2019: 30). Kolle dan Rosni (2012) menyatakan bahwa ada beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan:

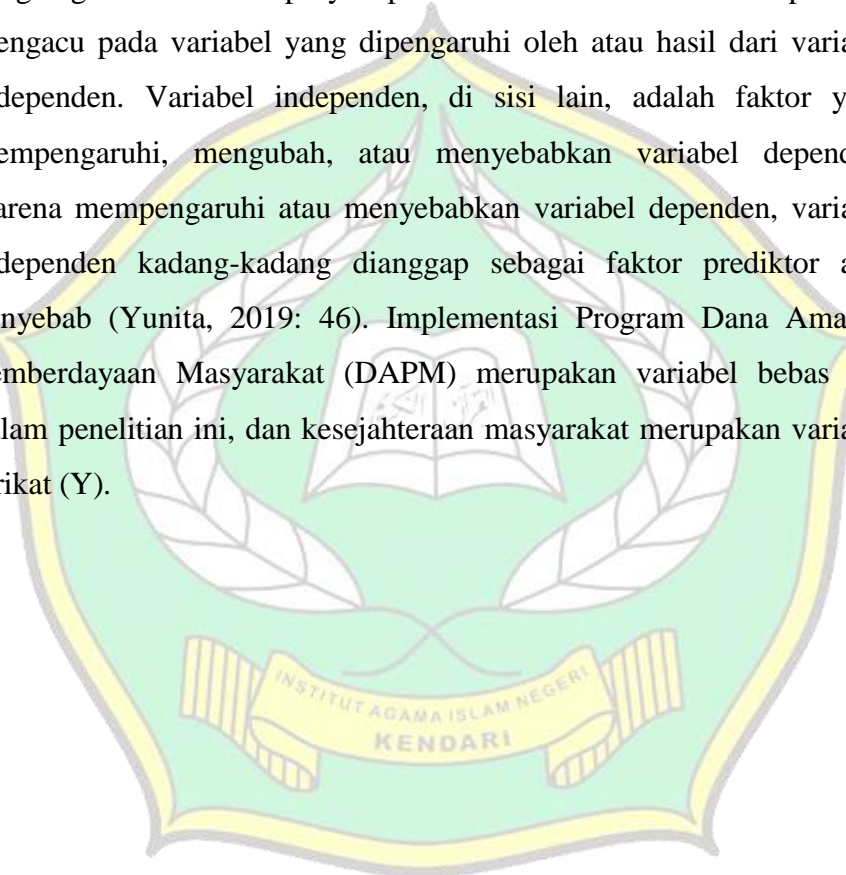
1. Pendapatan
2. Pendidikan yang terjangkau
3. Kualitas kesehatan

2.4. Kerangka Pikir

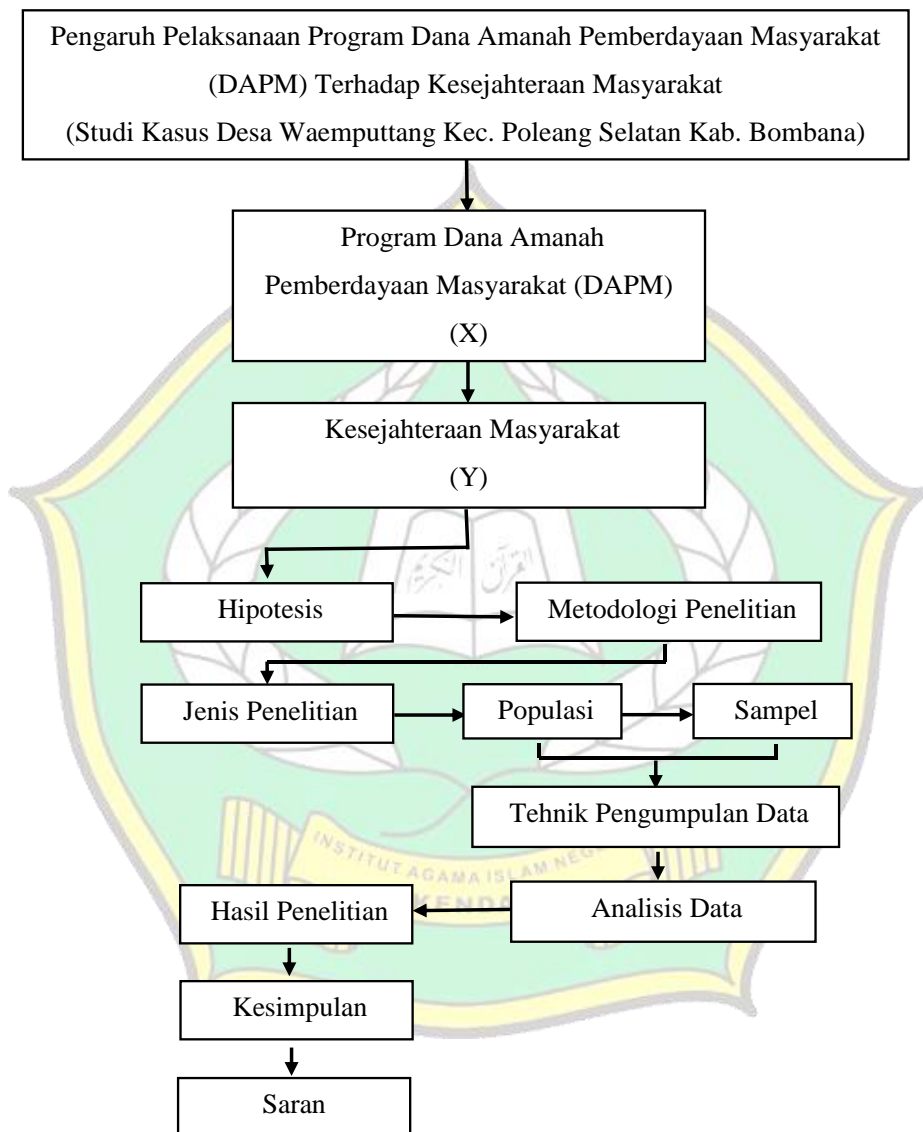
Kerangka pemikiran digambarkan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beberapa aspek yang telah diakui sebagai masalah yang penting oleh Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research*. Hubungan antar variabel yang akan diteliti akan

dijelaskan secara teoritis dengan kerangka pemikiran yang kokoh. Oleh karena itu, hubungan antara variabel dependen dan independen harus dijelaskan secara konseptual (Sugiyono, 2014:).

Variabel dependen dan variabel independen adalah dua variabel yang digunakan dalam proyek penelitian. Istilah "variabel dependen" mengacu pada variabel yang dipengaruhi oleh atau hasil dari variabel independen. Variabel independen, di sisi lain, adalah faktor yang mempengaruhi, mengubah, atau menyebabkan variabel dependen. Karena mempengaruhi atau menyebabkan variabel dependen, variabel independen kadang-kadang dianggap sebagai faktor prediktor atau penyebab (Yunita, 2019: 46). Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan variabel bebas (X) dalam penelitian ini, dan kesejahteraan masyarakat merupakan variabel terikat (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : *Diolah dilapangan*, 2022.

2.5. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah spekulasi jangka pendek yang biasanya digunakan sebagai solusi sementara untuk masalah penelitian dan secara teoritis dianggap memiliki probabilitas terbesar untuk menjadi benar. Biasanya, hipotesis menggambarkan bagaimana dua atau lebih variabel berhubungan satu sama lain. Peneliti dinyatakan dihadapkan pada dilema pada awal proses penelitian, dan dia berusaha menemukan solusi dengan mengumpulkan banyak pengetahuan melalui studinya. Peneliti berusaha mengumpulkan banyak penjelasan atau solusi alternatif untuk kesulitannya untuk membatasi perhatiannya hanya pada fakta-fakta yang relevan. Dia kemudian mencari informasi melalui penelitian untuk mendukung dan menemukan bukti bahwa jawaban yang dia yakini akurat. Dalam hal ini, kemampuan peneliti untuk "menebak secara ilmiah dan logis" tentang jawaban atas dilemanya diuji. Apa yang disebut sebagai "hipotesis" adalah jawaban atau solusi yang disarankan. Sebuah teori diajukan berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya:

H_0 : Dimana program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

H_1 : Dimana program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat